



## **BAB VI.**

# **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran perubahan RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bantul. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:



### 6.1.1. Analisis SWOT

#### a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

##### **Kekuatan**

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasional.
2. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
3. Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis.
4. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tinggi.
5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga.
6. Angka Partisipasi Murni dan APK cukup baik.
7. Angka Kriminalitas cukup rendah.
8. Posisi strategis Bantul sebagai 'halaman depan' dalam paradigma pembangunan DIY "*Among Tani Dagang Layar*".
9. Kabupaten Bantul sebagai bagian kawasan strategis DIY (Kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta).

##### **Kelemahan**

1. Ketimpangan pendapatan ada kecenderungan meningkat.
2. Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, sedikit diatas Provinsi DIY dan nasional.
3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
4. Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal.
5. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah.
6. Daya saing produk belum optimal.
7. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum optimal.
8. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis belum optimal.
9. Trend ratio guru dan siswa menurun.
10. Trend penyakit tidak menular meningkat.
11. Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi.
12. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada Pemerintah Pusat.



13. Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah.

## **b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

### **Peluang**

1. Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional Antar Negara (AFTA, MEA, dll).
2. DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.
3. Adanya agenda pembangunan nasional melalui *Nawa Cita*.
4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA dan JJLS).
5. Pemerintah DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan dalam pengembangan wilayah.
6. Adanya peluang bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.

### **Ancaman**

1. Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana alam.
2. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA.
3. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:



FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasional.</li><li>2. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.</li><li>3. Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis</li><li>4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga.</li><li>5. Angka Partisipasi Murni dan APK cukup baik.</li><li>6. Posisi strategis Bantul sebagai 'halaman depan' dalam paradigma pembangunan DIY.</li><li>7. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tinggi.</li><li>8. Kabupaten Bantul sebagai kawasan strategis DIY (Kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta)</li><li>9. Angka Kriminalitas cukup rendah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketimpangan pendapatan (gini ratio) kecenderungan menurun.</li><li>2. Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, diatas Provinsi DIY dan nasional.</li><li>3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.</li><li>4. Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal.</li><li>5. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah.</li><li>6. Daya saing produk belum optimal</li><li>7. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum optimal</li><li>8. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis belum optimal.</li><li>9. Trend ratio guru dan siswa menurun.</li><li>10. Trend penyakit tidak menular meningkat.</li><li>11. Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi.</li><li>12. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat.</li><li>13. Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah.</li></ol>



<b>PELUANG</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>STRATEGI W-O</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional Antar Negara (AFTA, MEA, dll).</li><li>2. DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.</li><li>3. Adanya agenda pembangunan nasional melalui Nawa Cita.</li><li>4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA, JJLS).</li><li>5. Adanya peluang bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.</li><li>6. Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengoptimalan segala potensi ekonomi dan produk Bantul untuk menembus pasar internasional.</li><li>2. Peningkatan kualitas hidup sebagai basis untuk mendukung kondisi nasional maupun sebagai bagian dari promosi wisata daerah.</li><li>3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan efek pengganda pertumbuhan bagi semua lapisan masyarakat.</li><li>4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai target-target SDG's.</li><li>5. Peningkatan sarana-prasarana dan akses untuk mendukung pembangunan kawasan selatan Bantul sebagai halaman depan DIY.</li><li>6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal untuk mendukung pariwisata daerah.</li><li>7. Pengembangan kawasan strategis daerah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan kualitas masyarakat Bantul.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.</li><li>2. Optimalisasi penataan ruang dalam rangka untuk memberikan kepastian investasi dan pengembangan ekonomi masyarakat.</li><li>3. Peningkatan potensi destinasi wisata dan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi untuk meningkatkan potensi sektor unggulan, industri kecil dan daya saing produk di pasar regional dan internasional.</li><li>4. Peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka untuk mempersiapkan kualitas masyarakat dalam menghadapi persaingan regional dan internasional.</li><li>5. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan pengembangan produk unggulan daerah.</li><li>6. Peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.</li><li>7. Pengembangan kualitas dan potensi sumberdaya manusia yang menjadi daya</li></ol>



		dukung bagi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 8. Peningkatan peran serta masyarakat dan kehidupan keluarga dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan pembangunan.
<b>ANCAMAN</b>  1. Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana. 2. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA. 3. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah termasuk pengembangan destinasi wisata.	<b>STRATEGI S-T</b>  1. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam rangka melakukan upaya mitigasi bencana. 2. Peningkatan kualitas SDM dan produk IKM dalam rangka ekspansi di pasar regional dan internasional. 3. Pengembangan potensi dan kawasan strategis dalam rangka memperkuat daya saing daerah.	<b>STRATEGI W-T</b>  1. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan produk unggulan setempat. 2. Pemetaan dan penataan kawasan potensial dan kawasan rawan bencana. 3. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

### 6.1.2. Kebijakan Sektorial

Penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan selain mempertimbangkan hasil analisa SWOT di atas, juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut meliputi:

#### A. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul 2015-2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RUPMK Bantul adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh upaya sektor terkait



dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bantul, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan potensi perekonomian Kabupaten Bantul, RUPMK Bantul menetapkan 6 (enam) sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Bantul didukung oleh pengembangan energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di kawasan pantai Kabupaten Bantul.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK Bantul diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis

Adapun secara lebih detail Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam RUPMK Bantul adalah sebagai berikut:



**Tabel 6.1.**  
**Fokus Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Bantul (RUPMK Bantul)**

NO	SEKTOR	URAIAN
1	Pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbenihan (<i>seed centre</i>)</li><li>2. Pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.</li><li>3. Pengembangan kawasan minapolitan dan industri budidaya perikanan</li></ol>
2	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan infrastruktur Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan kawasan Bantul Kota Mandiri.</li><li>2. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan dan Sedayu-Pajangan, dan di kawasan lainnya, yang terintegrasi dengan pengembangan perindustrian dan kawasan peruntukan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mewujudkan industri Kabupaten Bantul yang berdaya saing.</li><li>3. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan pariwisata sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya;</li><li>• Kawasan Goa Cerme sebagai kawasan wisata susur goa;</li><li>• Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya.</li></ul></li><li>4. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul.</li><li>5. Pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan infrastruktur transportasi lainnya.</li><li>6. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur pendukung di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kawasan Pembangunan Pariwisata, dan Infrastruktur strategis lainnya</li></ol>
3	Energi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Hibrid (Surya-Bayu) (PLTH) di area Pantai Pandansimo dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pantai Samas dan sekitarnya.</li><li>2. Pasokan energi untuk mendukung investasi di DIY</li></ol>
4	Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata.</li></ol>





NO	SEKTOR	URAIAN
		2. Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan dan saujana ( <i>lansekap</i> ).
5	Pendidikan	Pengembangan industri pendukung untuk industri pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan.
6	Ekonomi Kreatif	1. Industri kreatif kerajinan. 2. Industri berbasis teknologi informasi.

Fokus penanaman modal tersebut diatas selanjut dijabarkan dalam *Roadmap* Investasi RUPMK Bantul sebagai berikut:

2015-2016

- Quick Wins
- Peninjauan kembali dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang (pengembangan kawasan Bantul Kota Mandiri, kawasan-kawasan peruntukan industri (Sedayu dan Piyungan), infrastruktur jalan (Jalur Jalan Lintas Selatan), dan lain-lain.)

2015-2019

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan Industri Provinsi DIY, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

2020-2025

- Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*)

## B. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul 2016-2021

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Perpres No 42 Tahun 2013).

Berkaitan dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi 2015-2019, pendekatan multisektor menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan. Meskipun aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam *output* rencana aksi



pangan dan gizi, proses pencapaian aspek ini sangat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinergi dalam program dan pelaksanaannya. Demikian pula, aspek pemerataan akses pangan dan penggunaan pangan yang aman, bergizi, dan beragam melalui program yang saling terintegrasi (multisektor) merupakan perhatian utama agenda internasional dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan prinsipnya: “*No one leave behind*”.

Pembangunan pangan dan gizi secara nasional telah dimulai sejak tahun 2001 dengan program-program yang tersusun sebagai upaya pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Selanjutnya, pembangunan ketahanan pangan dan gizi saat ini, 2015-2019, melanjutkan trend positif pembangunan pangan dan gizi dengan pendekatan multi-sektor. Program-program kesehatan tetap menjadi *leading* sektor dalam peningkatan status kesehatan masyarakat ditunjang dengan sinergisme program-program unit kerja lainnya dalam rangka memenuhi *sufficient conditions* pencapaian status gizi masyarakat.

### **1. Tujuan Penyusunan RADPG**

Tujuan umum penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2016-2021 Kabupaten Bantul adalah sebagai panduan yang diacu dan arahan yang diperhatikan bagi SKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Bantul.

Berikut tujuan khusus penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2016-2021 Kabupaten Bantul:

1. Meningkatkan pemahaman dan peran seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sehingga terjaga keterpaduan mulai dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi.
4. Menetapkan pilihan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi.



6. Meningkatkan kemampuan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi.

## 2. Indikator Kinerja Utama RADPG

Untuk mengukur keberhasilan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama RADPG**

Indikator Kinerja Utama RADPG	Satuan	Kondisi Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi pada Akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,38	0,4	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37
Ketersediaan energi	kcal/kapita/hari	3.072	3.075	3.080	3.085	3.090	3.095	3.100	3.100
Ketersediaan protein	gram/kapita/hari	77,80	77,85	77,90	77,95	78,00	78,25	78,36	78,36

### 6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut ini:

**Tabel 6.3.Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</b>			
<b>Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas KKN</b>	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi 2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima
		2. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan	1. Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan



		pengelolaan keuangan daerah.	Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah
--	--	------------------------------	--

**Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan Berkepribadian Luhur**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.</b>	1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan. 2. Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang. 3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 4. Pembinaan dan pema-sarakatan olah raga.	1. Meningkatkan Sarana Prasa-rana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan. 1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan. 1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat  1. Meningkatkan prestasi olahraga.
	2. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing pendidikan. 2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembang-kan proses belajar mengajar. 3. Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.	1. Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin. 1. Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan. 2. Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti. 1. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini

**Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>	1. Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat. 2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu. 3. Validasi data warga kurang mampu.	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha. 1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.  1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat.
	2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing produk daerah.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. 2. Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi.



			3. Meningkatkan kontribusi belanja.
		2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	1. Mengurangi kesenjangan pendapatan 2. Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif.
	3. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul.	1. Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata.	1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata. 2. Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata.
	4. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas.	1. Akselerasi pengembangan industri kreatif.	1. Meningkatkan kualitas produk, SDM dan Kelembagaan UMKM Kreatif.
	5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.	1. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. 2. Pengembangan peternakan berbasis industri.	1. Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani.  1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Peternakan.
	6. Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat.	1. Peningkatan produksi perikanan.	1. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana perikanan.

**Misi 4 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-Prasarana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Risiko Bencana**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan</b>	1. Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	1. Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat  2. Peningkatan keselamatan transportasi	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana. 2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat  1. Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi
	2. Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup
	3. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	1. Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. 2. Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana.
	4. Terwujudnya kesesuaian	1. Peningkatan kualitas perencanaan,	1. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang.



	pemanfaatan ruang	pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
--	-------------------	---	---

**Misi 5 : Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Bantul Yang Agamis, Nasionalis, Aman, Progresif Dan Harmonis Serta Berbudaya Istimewa.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. 2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.	1. Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama. 2. Meningkatkan pemahaman hukum.
Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1. Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya

Dalam rangka mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantul, telah dirumuskan **Quick Win** pembangunan yang secara teknis dituangkan dalam perencanaan tahunan.

Pada tataran filosofis, Makaryo Mbangun Deso merupakan perwujudan dari Nawacita Pemerintah untuk membangun dari pinggiran. Selama ini, model pembangunan yang *top down oriented* dan sangat urban bias, telah menempatkan desa pada posisi marginal, terpinggirkan dan terabaikan dan kurang mendapat prioritas. Makaryo mbangun deso merupakan suatu upaya nyata membangun suatu paradigm pembangunan baru yang mengedepankan desa sebagai ujung tombak setiap langkah menuju peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, mengingat sebagian besar masyarakat masih tinggal di pedesaan, membangun desa berarti membangun sebagian besar masyarakat Indonesia.

Makaryo Mbangun Deso merupakan suatu perjuangan yang melibatkan semua elemen dan komponen bangsa, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi. Upaya bersama yang dilandasi tekad bersama akan menghasilkan suatu kekuatan sinergis untuk dapat mengatasi masalah, memanfaatkan peluang dan mengoptimalkan potensi yang ada bagi kemakmuran seluruh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi inti dari Makaryo Mbangun Deso, bukan meletakkan masyarakat desa sebagai obyek dan sasaran



pembangunan semata. Gerakan membangun diri masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi slogan, harus direalisasikan melalui Makaryo Mbangun Deso.

Makaryo Mbangun Deso harus dilakukan dalam kerangka perencanaan daerah yang telah ada, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tanpa menempatkan pada landasan itu, makaryo mbangun deso akan kehilangan arah, tidak sinkron dengan program pembangunan dari atas maupun tidak optimal untuk mendapat dukungan dari rencana tahunan setiap instansi pemerintah. Pada sisi yang lain, tanpa landasan perencanaan yang *integrative*, berkesinambungan dan terukur, Makaryo Mbangun Deso hanya akan menjadi slogan tanpa isi maupun realisasi, parsial dan temporer, serta rentan menjadi sumber masalah dalam pengambilan kebijakan yang keliru.

Makaryo Mbangun Deso memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya memerangi kemiskinan dengan meletakkan dua pilar utama, pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat telah menjadi tujuan sejak awal pembangunan dicanangkan, namun dinamika perkembangan masyarakat yang cepat menyebabkan muncul masalah yang telah meminggirkan, mengabaikan dan memiskinkan masyarakat, teruta masyarakat perdesaan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari kesehatan maupun pendidikan. Oleh karena itu serangan langsung dan frontal terhadap sumber masalah kualitas sumberdaya manusia menjadi agenda utama dan penting, yaitu melalui peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat di lingkungan perdesaan.

Makaryo Mbangun Deso juga berupaya membangun manusia dan masyarakat yang utuh. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat bukan sekedar aspek materil-ekonomi, namun juga masalah spiritual-non ekonomi, kebudayaan dan tata kehidupan masyarakat yang makin bermartabat. Makaryo Mbangun Deso adalah upaya, ikhtiar yang dilakukan namun semua itu tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Membangun keseimbangan hubungan dengan Tuhan dan hubungan diantara sesama manusia menjadi inti penting Makaryo Mbangun Deso. Melalui persepsi yang demikian, setiap langkah adalah ibadah, setiap langkah adalah upaya mengamalkan Pancasila.





## **6.2. Program Pembangunan Daerah**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Perumusan program pembangunan daerah merupakan tahap sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mensinergikan dengan program prioritas pembangunan Provinsi DIY serta memperhatikan dinamika, fokus dan arah program prioritas daerah.

Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2016-2021 difokuskan dan mempertimbangkan pada kebijakan umum dan kepentingan sebagai berikut:





## 1. Peningkatan Bantuan Pendidikan

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada 5 tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati *Unit Cost Standart* untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2017 untuk jenjang SD/MI direncanakan sudah mencapai 76% dari *Unit Cost Standart*, dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.24.938.710.000, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS direncanakan sudah mencapai 69% dari *Unit Cost Standart* dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.26.195.000.000. Adapun skema rencana peningkatan biaya BOP tahun 2017-2021 sebagai berikut:

**Tabel 6.4. Rancangan Peningkatan BOP Jenjang PAUD**

No	Kegiatan	Jumlah	Anggaran (Rp) (000)	Tahun (dlm ribuan)					Ket.
				2017	2018	2019	2020	2021	
<b>a</b>	<b>BBOP APBD</b>								Besarnya anggaran tiap tahun naik 5%
1	TK Pembina Kab	1	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	
2	TK Pembina Kecamatan	5	5.000	25.000	26.250	27.562	28.940	30.387	
3	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	1	450.000	450.000	472.500	496.125	520.931	546.977	
	Jumlah			485.000	509.250	534.712	561.448	589.520	
<b>b</b>	<b>BOP Pusat</b>			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	

Sumber. Bappeda, 2016

**Tabel 6.5.  
Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SD/MI**

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/ murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET % Unit Cost (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 800.000/ana k)
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	SD/MI (BOP)	84.538	anak	295	24.938.710					76%
		85.806	anak	350		30.032.124				79%
		87.093	anak	450			39.191.124			86%
		88.400	anak	550				48.619.757		93%
		89.726	anak	560					50.246.309	94%



NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/ murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% Unit Cost (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 800.000/ana k)
2	Sekolah SSN	18	Sekolah	10.000	180.000					SSN : Sekolah Standar Nasional
		20	Sekolah	10.000		200.000				
		22	Sekolah	10.000			220.000			
		24	Sekolah	10.000				240.000		
		26	Sekolah	10.000					260.000	
3	Sekolah pra SSN	17	sekolah	10.000	170.000					
		19	sekolah	10.000		190.000				
		21	sekolah	10.000			210.000			
		23	sekolah	10.000				230.000		
		25	sekolah	10.000					250.000	
4	Sekolah inklusi	48	sekolah	7000	336.000					
		49	sekolah	7000		343.000				
		50	sekolah	7000			350.000			
		51	sekolah	7000				357.000		
		52	sekolah	7000					364.000	
	JUMLAH				25.624.710	30.765.124	39.971.922	49.446.757	51.120.309	

Sumber. BAPPEDA, 2016

**Tabel 6.6.**  
**Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SMP/MTs**

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% Unit Cost (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 1.000.000/a nak)
1	SMP/MTs (BOP)	40.300	anak	650	26.195.000					69%
		40.905	anak	830		33.950.735				76.8%



Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% Unit Cost (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 1.000.000/a nak)
		41.518	anak	1000			41.518.067			84%
		42.141	anak	1100				46.354.922		88%
		42.775	anak	1200					51.327.541	92%
2	Sekolah SSN	40	Sekolah	10.000	400.000					SSN : Sekolah Standar Nasional
		42	Sekolah	10.000		420.000				
		44	Sekolah	10.000			440.000			
		46	Sekolah	10.000				460.000		
		48	Sekolah	10.000					480.000	
3	Sekolah pra SSN	35	sekolah	10.000	350.000					
		37	sekolah	10.000		370.000				
		39	sekolah	10.000			390.000			
		41	sekolah	10.000				410.000		
		43	sekolah	10.000					430.000	
4	Sekolah inklusi	12	sekolah	7.000	120.000					
		14	sekolah	7.000		140.000				
		16	sekolah	7.000			160.000			
		18	sekolah	7.000				180.000		
		20	sekolah	7.000					200.000	
5	Subsidi UNBK	5	sekolah	10.000	50.000					UNBK : Ujian Nasional Bebasis Komputer
		7	sekolah	10.000		70.000				
		9	sekolah	10.000			90.000			
		11	sekolah	10.000				110.000		
		13	sekolah	10.000					130.000	
6	Sekolah Olahraga Nasional	1	sekolah	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	Sekolah Olahraga Daerah	3	sekolah	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<b>JUMLAH</b>				27.175.000	35.010.735	42.658.067	47.574.922	52.627.541	

Sumber. Bappeda, 2016



## **2. Total coverage Jaminan Kesehatan**

Sesuai dengan *Road Map* Nasional, bahwa pada tahun 2019 semua jenis jaminan kesehatan harus melebur/bertransformasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul juga secara bertahap akan melakukan transformasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dari Jamkesda ke BPJS. Tahapan rancangan transformasi jaminan kesehatan akan mulai tahun 2017 s/d tahun 2021.



**Tabel 6.7.**  
**Rancangan Pentahapan Transformasi Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS**

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target
Premi Jamkesda (Buffer)	121.666	14.599.920	90	100.803	12.096.360	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90
Cavital Risk		619.080			514.095			51.000			51.000			51.000			51.000	
Premi BPJS				50.000	13.800.000		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628	
Piutang RS dan Puskesmas								4.000.000										
<b>Jumlah</b>	<b>121.666</b>	<b>15.219.000</b>		<b>150.803</b>	<b>26.410.455</b>		<b>160.803</b>	<b>46.872.628</b>		<b>160.803</b>	<b>46.872.628</b>		<b>160.803</b>	<b>46.872.628</b>		<b>160.803</b>	<b>46.872.628</b>	

Sumber.Bappeda, 2016



### 3. Akselerasi penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2011 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Dari data BPS terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 mencapai 15,2% lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Tahun 2014.

Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain: program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, validasi data keluarga miskin serta pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS). Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari Pemerintah DIY secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.

### 4. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sebagai salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, pengembangan pariwisata akan tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dikarenakan dampak atau *multiplier effect* nya terhadap akselerasi perekonomian daerah sangat positif, antara lain penyediaan lapangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah dan pertumbuhan industri pariwisata serta kontribusi dalam bentuk PAD terhadap Pemerintah Daerah. Pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan peningkatan daya tarik serta pelayanan pariwisata.

Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- **DPD-Segoro Kidul** meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;



- **DPD-Songgo Langit** meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Tourism, Olahraga dan Industri;
- **DPD-Songgo Negoro** meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai Kawasan Wisata Industri Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah dan MICE;
- **DPD-Pangeran Diponegoro** meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan Pedesaan; dan
- **DPD-Pancer Bumi** meliputi Bantul, Bangliwuro, Pundong dan Jetis sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga dan Kerajinan.

## 5. Pengembangan Kawasan Budaya

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

Kawasan strategis pengembangan kawasan budaya Kabupaten Bantul diarahkan di beberapa kawasan yaitu:

- a) Kawasan Kotagede Banguntapan,
- b) Kawasan Imogiri,
- c) Kawasan Pleret,
- d) Kawasan Goa Selarong Pajangan,
- e) Kawasan Ambar Binangun Kasihan,
- f) Kawasan Masjid Pathok Negoro Kasihan,
- g) Kawasan Parangtritis Kretek,
- h) Kawasan Mangir Pajangan,
- i) Kawasan Makam Sewu Pandak,
- j) Kawasan Cagar Budaya Pendidikan.



## **6. Pengembangan Industri Kreatif**

Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki industri kreatif yang beraneka ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan dunia usaha semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul akan mendorong pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal guna meningkatkan daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional dengan memfokuskan pada pengembangan sentra-sentra kreatif.

## **7. Peningkatan ketahanan pangan**

### **a) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan**

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat dewasa ini, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencari alternatif dan strategi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan.

### **b) Pengembangan peternakan modern**

Kebutuhan dan konsumsi pangan hewani masyarakat yang selalu meningkat serta keterbatasan pasokan ternak yang disebabkan oleh pengelolaan yang masih tradisional, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kebijakan pengembangan peternakan modern dengan konsep industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak siap potong sehingga dapat mencukupi dan pasokan kebutuhan pangan hewani masyarakat serta dapat memberikan kestabilan harga pangan sehingga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat.

### **c) Pengembangan Perikanan**

Perikanan merupakan sektor penting dalam pembangunan karena mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan sebagai penyedia pangan khususnya sumber protein.





Potensi perikanan di Kabupaten Bantul cukup tinggi mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sektor perikanan tidak hanya menggerakkan sektor perikanan saja, namun juga mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*). Industri penyedia sarana produksi perikanan dan industri paska panen akan memberikan dampak yang lebih besar dalam perekonomian. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulasi dan dorongan dalam pembangunan sektor perikanan melalui kebijakan yang tepat dan berpihak kepada terciptanya sistem ekonomi perikanan yang optimal dan berkelanjutan dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan masyarakat.

#### **8. Pengembangan Kawasan Strategis terkait dengan Investasi**

Investasi merupakan salah satu stimulus dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini yang mendasari pemerintah Kabupaten Bantul melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis investasi yang meliputi Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata. Melalui pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

#### **9. Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan**

Potensi CSR yang cukup besar di Kabupaten Bantul dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Melalui kerjasama yang sinergis dengan pihak swasta diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penyelenggaraan tanggung jawab sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai berikut:



**Tabel 6.8.**  
**Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungja wab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1. Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Nilai Maturitas SPIP	Level 1 (1,92)	Level 3 (3,3)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Pengawasan)	INSPEKTORAT
					Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur	84%	91,30	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Fungsi Penun- jang Kepega- waian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
			2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima		Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	57,3	75	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Fungsi PenunjangLainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Indeks Kepuasan Masyarakat	78.13%	84%	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Fungsi Penun- jang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
								Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
								Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
								Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
								Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah		
								Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah		
								Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
					Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	27%	70 %	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
					Indeks Kepuasan Aparatur	73%	82%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
					Persentase Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tepat Waktu	56,88%	85%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penanaman Modal	DPMPPT
								Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Indeks Kepuasan Masyarakat	77	80,5	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	60%	90%	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Prosentase SKPD yang menerapkan layanan unggulan <i>Digital Government Service</i> (DGS)	60%	90%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
								Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		
								Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		
					Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	N/A	92%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	N/A	95%	Proram Keserasian Kebijakan Kependudukan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	81%	Program Pengelolaan Data Kependudukan		
					Persentase Penegakan Perda	100%	72%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Program Penegakan Perda		
					Persentase pemilih yang berpartisipasi	70,5%	75%	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Persentase pencapaian prolegda	22%	22%	Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SEKRETARIAT DPRD
		2. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	1. Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	79 (BB)	82 (A)	Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
								Program Penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa		
								Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
								Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
						N/A	95%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Persentase Rata-rata capaian Sasaran Daerah			Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Sosial dan Budaya		
					Persentase Rata-rata capaian target kinerja program OPD	N/A	91,50%	Program pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA
					Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	100%	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70%	90%	Program pemberdayaan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	60%	100%	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Persentase Belanja Pegawai	58,90%	45%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Opini Pemeriksaan BPK	1 (WTP)	1 (WTP)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang	BKAD



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan)	
								Program Pengelolaan Barang Daerah		
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,21%	26%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
					Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	16,18%	21,00%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	1. Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan.	Umur Harapan Hidup	AKI	87.5/100.00 0 KH	85/100.00 0 KH	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
								Program Upaya kesehatan masyarakat		
					AKB	8,35/ 1.000 KH	8,0/ 1.000 KH	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Net Death Rate	18,98/ 1.000 pasien	16,5/ 1.000 pasien	Program Peningkatan pelayanan rumah sakit	Kesehatan	RSUD
								Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3.34 jiwa	3,04 Jiwa	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
								Program Pelayanan Kontrasepsi		
					Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,38%	0,37%	Program Perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Ketersediaan Energi	3.072 kkal/kapita/hari	3.100 kkal/kapita/hari	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	Ketahanan Pangan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Ketersediaan Protein	77,80 kkal/kapita/hari	78,36 gr/kapita/hari			
					Skor Pola Pangan Harapan	93,1	93,16			
					Angka Kesakitan/ Insiden Rate (IR) DBD	150/ 100.000 penduduk	110/ 100.000 penduduk	Program Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Prevalensi Penderita HIV	<0,5	0,1	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi	24%	30%	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.	Kepemudaan dan Olahraga	DINA PENDIDIKAN,





No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti			Program peningkatan sarpras olahraga		PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing pendidikan.	1. Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.	Angka Harapan Lama sekolah	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	APK SD:94,5% APK SMP:91,5% APM SD:83,02% SMP:67,64%	APK SD: 96,5% SMP: 96% APM SD: 84,65% SMP: 68,20%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Angka Melanjutkan (Ke SMP/SLTA)	ke SMP 100% ke SMA 90.13%	Ke SMP: 100%, ke SMA: 100%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (jenjang SMP)		
					Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.74 tahun	9 tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		
					Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Ranking IV DIY (SD)	Ranking I DIY (SD)	Program Peningkatan Prestasi Akademik	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Ranking III DIY (SMP)	Ranking I DIY (SMP)			
					Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	5 Buah	26 Buah			
					Persentase Peningkatan Pemustaka yang	28%	33%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar	1. Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan.  2. Meningkatkan pendidikan berbasis budi pekerti.		berkunjung ke Perpustakaan					
					Persentase kelulusan	SD:99.9% SMP:100 %	SD: 100 SMP:100	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Angka Putus Sekolah	SD 0.02% SMP: 0,02%	SD:0,02% SMP: 0,02%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		
					APK PAUD	APK PAUD: 98,78%	APK PAUD: 98,95%	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
		3. Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak	1. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini						Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat.	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha	Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	4,1%	2,8%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKER-TRANS



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	1. meningkatkan kesejahteraan keluarga		Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	13,9%	12,49%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
					Nilai Tukar Petani	101,1	102	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3. Validasi data warga kurang mampu	1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	14%	12,50%	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya		
					Indeks Desa Membangun	85	24	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
								Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing produk daerah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekspor	6,85%	7%	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
					Jumlah Pasar Tipe A,	0	4 unit	Program Penataan Pasar Rakyat Program Pemberdayaan Pedagang	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
					Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	N/A	5,95 %	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
			2. Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi.		Pertumbuhan Investasi	8,43 %	9,5 %	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
			3. Meningkatkan kontribusi belanja		Percepatan Belanja Pemerintah	51%	75%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
		2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	1. Mengurangi kesenjangan pendapatan	Gini Ratio	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.163.800	Rp. 1.773.479	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjab wab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Program Penempatan Tenaga Kerja		
			2. Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	N/A	180 unit	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUS- TRIAN
								Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
					Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	N/A	10 unit	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUS- TRIAN
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.500.114 orang	6.780.706 orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
			2. Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata		Lama Tinggal Wisatawan	1,1 hari	2,2hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
								Program Pengembangan Kemitraan		
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Akselerasi pengembangan industri kreatif	1. Meningkatkan kualitas produk, SDM dan Kelembagaan UMKM Kreatif	Cakupan industri kreatif	Pertumbuhan industri	1,56%	2%	Program pengembang an industri kecil dan menengah	Perindustrian	DINAS KOPE- RASI, USAHA KECIL MENE- NGAH, DAN PERINDUS- TRIAN
								Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			2. Meningkatkan pengembangan sumber daya energi		Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	0%	75%	Program Potensi Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	1. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	1. Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	230.860 ton	232.272,99 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Produksi Tanaman Hortikultura	14.363,65 ton	15.502,70 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman Perkebunan	14.458,93 ton	14.655,19 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		2. Pengembangan peternakan berbasis industri	Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Peningkatan Produksi daging	14.142,37 ton	14.790,70 ton	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
								Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	1. Optimalisasi sumber daya perikanan	Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan dan sarana dan prasarana	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Peningkatan Produksi Perikanan	12.106 ton	13.577 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
								Program Pengembangan Perikanan Tangkap		
								Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	1.Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat.	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	84,01%	76,08 %	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	76%	84%	Program Pembangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.		Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	42%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase kecukupan air irigasi	78%	83,16%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2. Peningkatan keselamatan transportasi	Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5%	1,83%	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
								Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
								Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	Meningkatkan pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	30,69	56	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara (IKUd)	46,47	90	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Tutupan Lahan	24,29	61,2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
					Volume sampah yang tertangani	410.000 m3	470.000 m3	Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP





No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.	Desa Tangguh Bencana	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Benca-na yang meme-nuhi respon time 15 menit	90%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD
					Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,19%	5,20%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan keten-traman, keter-tiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD
			2. Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana		Persentase Relokasi Warga	N/A	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;	Urusan keten-traman, keter-tiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD
					Presentase penanganan banjir	13,52%	47,68%	Program pengendalian banjir	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKER-JAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	N/A	4	Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
			2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	70%	80%	1. Program pemanfaatan ruang 2. Program Pengendalian tata ruang	Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungja wab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			3. Meningkatkan status kepemilikan tanah		Cakupan Sertifikasi Tanah	N/A	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pertanahan	Pertanahan	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama	1. Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama	Angka Kriminalitas	Jumlah intoleransi di masyarakat	N/A	0 Kasus	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat		1. Meningkatkan pemahaman hukum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	0 %	100 %	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
		Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
		Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan								
		Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak				0,38	0,38	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Jumlah Pemuda Pelopor	4 Orang		4 Orang	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1. Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian adat dan tradisi	N/A	30%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN
					Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	N/A	24%	Program Pengembangan Nilai Budaya		
								Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		